



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP SUB DAS BELAYAN

Jalan APT. Pranoto Tenggarong Kode Pos 75515

Telp/Fax (0541) 6722414

Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel : belayankphp@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPTD KPHP SUB DAS BELAYAN
NOMOR : 00.8.3.2/135/KTPS/SDB-I/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA UPTD KPHP SUB DAS BELAYAN
TAHUN 2024

KEPALA UPTD KPHP SUB DAS BELAYAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas UPTD KPHP Delta Mahakam;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD KPHP Delta Mahakam;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

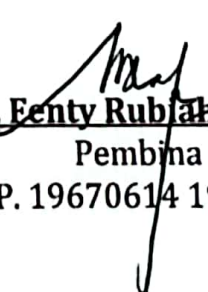
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan UPTD KPHP KPHP Sub Das Belayan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tengagrong
Pada tanggal : 27 Mei 2024

Kepala,


Ir. Fenty Rubjah Haraha, M.Si
Pemina
NIP. 19670614 198709 2 001

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA UPTD KPHP SUB DAS BELAYAN
NOMOR : 00.8.3.2/135/KPTS/SDB-I/2024 TANGGAL MEI 2024**

**JENIS PELAYANAN UPTD KPHP SUB DAS BELAYAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMNUR**

No	Jenis Pelayanan
1	Penanganan Surat Masuk
2	Penanganan Surat Keluar
3	Pelayanan Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala
4	Pelayanan Pengajuan Kenaikan Pangkat
5	Pelayanan Pengajuan Usulan Taspen
6	Pelayanan Pembuatan Surat Perintah Tugas
7	Pelayanan Pengajuan Kartu BPJS
8	Pelayanan Pengajuan Cuti
9	Fasilitasi Pengajuan Karis dan Karsu
10	Fasilitasi Peminjaman Barang Inventaris
11	Fasilitasi Pengajuan Kartu Pegawai
12	Fasilitasi Pengajuan Pensiun
13	Fasilitasi Pemeliharaan Barang Inventaris
14	Fasilitasi Pengajuan satya Lencana
15	Pengelolaan Absen
16	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan
17	Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
18	Fasilitasi Bantuan Bibit
19	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani Hutan
20	Fasilitasi Penyiapan Perhutanan Sosial